

ABSTRAK

Reformasi kebijakan amandemen UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, dan No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 1 UU No. 16 tahun 2009 menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau kata lain dari rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan suatu negara sangat berpengaruh dari penerimaan pajak negara tersebut, dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi, sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mereview/menelaah kesesuaian antara peraturan yg berlaku dengan penerapannya dilapangan. yaitu PP No. 51 Tahun 2008 tentang Penghasilan atas usaha jasa konstruksi, Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Permenkeu No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Hasil penelitian menunjukkan UU yang berlaku telah sesuai dengan praktek dilapangan walaupun terkadang masih banyak pihak yang Pro-Kontra terhadap terbitnya peraturan baru karena terkadang dianggap memberatkan wajib pajak.

Kata Kunci : *Tax Review*, PPh Badan Pasal 4 ayat (2), Jasa Konstruksi

ABSTRACT

Policy reform amendment to the Law No. 36 of 2008 regarding income tax, and No. 16 of 2009 regarding General Provisions and Tax Procedures (CTP). In Article 1 of Law No. 16 of 2009 states that, taxes are mandatory contributions to the state that are owed the individual or entity that is enforceable under the law, by not being rewarded directly and used for the purposes of the state for the greatest prosperity of the people. Based on the above understanding that basically tax payments intended for the prosperity of the people, or in other words from the people and for the people. Development of a country is very influential of the state tax revenue, in the development of our nation's growing rapidly in many aspects of life with more adequate public facilities and modern through technological progress is the result of the payment of tax by the taxpayer which is composed of individuals and entities.

This research was conducted at a service company engaged in the construction, in accordance with Law No. 18 of 1999 on Construction Services, which aims to review / assess the suitability of the rules that apply to its application in the field. ie PP 51 Year 2008 on Income on construction services, taxation on income from construction services set out in the Ministry Decree 187 / PMK.03 / 2008, stipulates that the income received by the taxpayer in the country and a permanent establishment of the business in construction services, subject to income tax under the income Tax Act, where the income received may be subject to final withholding tax based on the tax bill No. 36 Year 2008 on Income Tax Article 4, paragraph 2.

The results showed that the applicable law in compliance with the practice in the field, although sometimes there are many who Pros and Cons of the issuance of new regulations because sometimes considered burdensome taxpayer.

Keywords: Tax Review, corporate income tax Article 4 paragraph (2), Construction Services